BAB III

TINJAUAN PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Perpustakaan

3.1.1. Pembinaan Perpustakaan Pada Masa Sebelum Kemerdekaan RI

3.1.1.1. Masa Pendudukan Belanda

Kemungkinan sudah adanya perpustakaan dalam periode kerajaan-kerajaan besar sebelum masa penjajahan Belanda, seperti Sriwijaya, Majapahit dan lain sebagainya, disimpulkan dari data dan informasi sejarah tentang perkembangan kepustakaan dalam masa kerajaan-kerajaan tersebut, serta hadirnya sejumlah pujangga besar. Eksistensi perpustakaan istana tersebut tampak diteruskan dalam kerajaan-kerajaan yang kemudian berdiri dengan sisa-sisanya hingga sekarang. Antara lain di Surakartadikenal "Radyapustaka", di Yogyakarta dikenal "Sonobodoyo", dan di Istana Mangkunegaran "Reksopustoko" dan di Bali di Gedung Kirtya. Dalam masa penjajahan Belanda perpustakaan mulai diselenggarakan pada akhir abad ke-18, setelah pemerintah Kolonial Belanda mempersiapkan dan melaksanakan "Etische politic" atau "Politik balas budhi". Guna kepentingan penjajahannya, Belanda mulai mempelajari pelbagai aspek kebudayaan rakyat, aspek ekonomi yang potensial dan pendirian rakyat. Sesuai dengan sifat dan tujuannya, perpustakaan-perpustakaan yang didirikan Belanda pertama adalah perpustakaan-perpustakaan khusus. Sebagai contoh dapat disebutkan antara lain:

1) Perpustakaan Museum Pusat, yang didirikan oleh Bataviasche Genootsschap voor Kunsten en Watenschappen pada tahun 1778. Perpustakaan ini dianggap

sebagai perpustakaan tertua dan dewasa ini telah diintegrasikan ke dalam Perpustakaan Nasional.

2) Lembaga kepustakaan Bibliotheca Bogoriensis yang didirikan pada tahun 1842 (sekarang disatukan dalam Perpustakaan Pusat Biologi dan Pertanian)

3) Perpustakaan pada Lembaga Meteorologi dan Geofisika, yang didirikan dalam tahun 1866.

4) Perpustakaan pada Bosscha Observatorium Bandung, didirikan dalam tahun 1920. Selanjutnya untuk kepentingan para pegawainya terutama pejabat-pejabat Belanda, pelbagai departemen menyelenggarakan perpustakaan-perpustakaan dinasnya. Baru setelah berdirinya Balai Pustaka pada tahun 1922, pemerintah Belanda mulai menyelenggarakan layanan perpustakaan yang bersifat umum melalui taman bacaan umum di kota- kota besar, perpustakaan rakyat (volksbibliotheek) di sekolah-sekolah dasar. Beberapa toko buku besar menyelenggarakan layanan perpustakaan keliling dengan menggunakan tromol bacaan. Pengelola perpustakaan dilakukan oleh masing-masing departemen dan lembaga.

3.1.1.2. Masa Pendudukan Jepang

Dalam masa pendudukan Jepang kegiatan layanan perpusatakan terhenti sama sekali. Adalah suatu keuntungan bagi perkembangan perpustakaan di Indonesia bahwa Pemerintah Bala Tentara Jepang tidak mengadakan pengrusakan terhadap koleksi pelbagai perpustakaan yang ada. Koleksi (bahan pustaka) berbahasa Belanda di perpustakaan-perpustakaan rakyat hanya diperintahkan untuk disingkirkan dan tidak dipinjamkan.

3.1.2. Masa Setelah Kemerdekaan

3.1.2.1. Masa Orde Lama

Konsepsi Indonesia tentang perpustakaan bersumber dari pandangan yang sangat mendasar. Bagi bangsa Indonesia perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Pandangan tersebut telah mendorong Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk segera melakukan perjuangan fisik melawan kolonial Belanda, mulai dengan kegiatan di bidang perpustakaan. Dari usaha-usaha terpenting yang telah dilaksanakan dari tahun 1950-1968 (PraPelita) dapat dicatat :

1) Berdirinya Perpustakaan Yayasan Hatta pada tahun 1950 di Yogyakarta.
2) Berdirinya Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial pada tahun 1952 di Jakarta. Perpustakaan ini diterima dari suatu badan kerjasama kebudayaan Indonesia-Belanda : "Stiching voor Culturele Samenverking". Selanjutnya perpustakaan ini telah diintegrasikan ke dalam Perpustakaan Nasional.
3) Berdirinya Kantor Bibliografi Nasional, dengan SK Menteri PP dan K tanggal 11 Desember 1952, nomr 46860/Kab. Kantor ini semula berkedudukan di Bandung dan pada tahun 1955 dipindahkan ke Jakarta. Dalam sejarah perkembangannya, kantor ini setelah berada dibawah pengawasan Biro Perpustakaan, kemudian menjadi salah satu bidang pada Pusat Pembinaan Perpustakaan dan akhirnya Kantor Bibliografi Nasional tersebut diintegrasikan ke Perpustakaan Nasional.
4) Berdirinya Biro Perpustakaan Departemen P D dan K. Untuk menangani masalah-masalah perpustakaan berdasarkan SK Menteri PP dan K, tertanggal 15 Februari 1951, nomor 4223/kab, dibentuk Biro Perpustakaan

di lingkungan Sekretariat Jenderal. Biro yang baru bekerja secara aktif mulai 1954 dan dipimpin pertama kali oleh Nn. Lie Sek Hiang, SH.

Rincian lebih lanjut tugas Biro ditetapkan berdasarkan SK Menteri P D dan K nomor 92/1964.

Biro Perpustakaan, yang juga dikenal sebagai Biro Perpustakaan dan Perbukuan.

Atas usul kepala Biro Perpustakaan dan Perbukuan, pada tahun 1967 dibentuk lembaga perpustakaan, dengan SK Menteri nomor 095/1967, tertanggal 6 Desember 1967. Biro perpustakaan dan perbukuan tetap menjalanlakan tugas staf, sedang tugas pembinaan dan pengembangan perpustakaan diserahkan kepada lembaga perpustakaan. Biro perpustakan tetap berkantor di jalan Cilacap 4 Jakarta, sedangkan Lembaga Perpustakaan menempati kantor di jalan Merdeka selatan no. 11 Jakarta.

5) Konperensi Perpustakaan seluruh Indonesia I yang diselenggarakan atas anjuran departemen PP dan K pada tahun 1954 telah mendorong berdirinya :

a) Dewan Perpustakaan Nasional yang dibentuk dengan SK Menteri PP dan nomor 1728/Kab tahun 1955 jo SK Menteri nomor 36608/Kab/1955, dan dibubarkan dengan SK Menteri PP dan K nomor 125829/S tahun 1959.

b) Perhimpunan Ahli Perpustakaan dan Dokumen-tasi Indonesia (PAPADI) pada tahun 1954.

c) Perpustakaan Rakyat Jawatan Pendidikan Masyarakat.

d) Pelbagai Perpustakaan di lingkungan Pendi-dikan Tinggi dan per-pustakaan khusus di Departemen-Departemen

6) Berdirinya Jurusan Ilmu Perpustakan pada FSUI pada tahun 1963

3.1.2.2. Masa Orde Baru

1) Lembaga Perpustakaan

Instansi pembina yang mengendalikan kegiatan perpustakaan ke dalam masa PELITA adalah Lembaga Perpustakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga Perpustakaan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 095/1967, tertanggal 6 Desember 1967 dengan tugas :

a) bertindak sebagai kantor pusat bagi 19 Perpustakan Negara yang telah ada di beberapa ibukota propinsi dan kotaraya Jakata.

b) menyelenggarakan Perpustakaan Sejarah, Politik dan Sosial di jalan Merdeka Selatan no. 11 Jakarta.

c). menyelenggarakan penyusunan Bibliografi Nasional (dengan jalan mengumpulkan buku-buku terbitan dalam negeri atas dasar peraturan wajib simpan) serta menyusun Katalogus Induk.

d) mengadakan pemikiran ke arah persiapan pembentukan Perpustakaan Nasional dan sistem perpustakaan yang meliputi seluruh negara.

2) Pusat Pembinaan Perpustakaan

a) Periode 1975-1980

Dalam rangka pengaturan kembali susunan organisasi dan tata kerja Departemen P dan K nonmor 079/1975 Lembaga Perpustakaan diubah menjadi Pusat Pembinaan Perpustakaan. Sebagai pelaksana tugas dibidang perpustakaan, Pusat Pembinaan Perpustakaan dibawah Menteri P dan K, sedang dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Pusat Pembinaan Perpustakaan bertanggungjawab kepada Sekjen Departemen P dan K

b) Periode 1980-1989

Kalau pada masa PELITA II kegiatan Pusat Pembinaan Perpustakaan lebih banyak ditandai dengan usaha perintisan dan rehabilitasi apa yang ada, maka dalam periode Pelita III dan IV kegiatannya sudah bersifat konsolodasi.

Sesuai kebijakan Menteri P dan K pada awal Pelita II, Pusat Pembinaan Perpustakaan telah berhasil menyeleng-garakan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Perpustakaan Negara menjadi Perpustakaan Wilayah serta menambah jumlahnya secara bertahap menjadi 26 buah. Perpustakaan Wilayah selanjutnya merupakan unit pelaksana teknis perpustakaan di daerah masing-masing bagi Pusat Pembinaan Perpustakaan.

Demikian pula telah diselesaikan persiapan pembentukan Perpustakaan Nasional yang berdirinya dikukuhkan dengan SK Mendikbud nomor 0164/0/1980, dengan status sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam rangka pengaturan kembali organisasi dan tata kerja pusat-pusat di lingkungan Depdikbud berdasarkan SK Menteri nomor 0222g/0/1980. Pusat Pembinaan perpustakaan mengalam pula perubahan tugas dan organisasi.

Meski masih banyak aspek pengembangan yang perlu ditangani namun hasil-hasil tersebut telah cukup memberikan citra dan aspirasi pemerintah dan rakyat tentang arti dan peranan perpustakaan bagi pembangunan bangsa. Hal ini terbukti dengan terbitnya Keppres RI nomor 11 tahun 1989, tentang Perpustakaan Nasional sebagai suatu Lembaga Peemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pembinaan hingga terbitnya Keppres tersebut berada di dalam

wewenang dan tugas Pusat Pembinaan Perpustakaan, dan tugas layanan sebelumnya berada di tangan Perpustakan Wilayah, dipadukan menjadi tugas Perpustakaan Nasional (gaya baru) dengan kedudukan esselon I.

3.2. Perpustakaan Negara

Awal berdirinya Perpustakaan Negara RI sejalan dengan terbitnya SK Mendikbud tanggal 15 Februari 1951 nomor 4223/Kab tentang Lapang Pekerjaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam SK tersebut antara lain tercantum juga tentang penetapan tugas dan fungsi Biro Perpustakaan yang antara lain tugasnya adalah mengurus penyelenggaraan :

a. perpustakaan guna kepentingan pemerintah

b. perpustakaan pengumpul semua hasil penerbit seluruh Indonesia

c. perpustakaan yang bersifat ilmu pengetahuan

Sebelum diaktifkannya Biro Perpustakaan pada bulan September 1954, ada kegiatan yang mendahuluinya yaitu diseleng-garakannya Konperensi Perpustakaan Seluruh Indonesia yang pertama atas anjuran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 Maret 1954 di Jakarta. Keputusan Konperensi Perpustakan Pertama Seluruh Indonesia, yang diikuti dengan aktifnya Biro Perpustakaan merupakan landasan pembenahan organisasi Perpustakaan Negara.

Pembentukan Perpustakaan Negara sangat tergantung pada adanya perhatian dan peranan tiga instansi yaitu :

a. Biro Perpustakaan, yang secara teknis dan organisatoris mengatur dan menyelenggarakan Perpustakaan Negara;

b. Perwakilan Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, yang secar administratif membantu kegiatan Perpustakaan Nasional secara rutin di daerah;

c. Pemda Tk I, yang memberikan fasilitas-fasilitas lainyya untuk memungkinkan Perpustakaan Negara setempat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perpustakaan Negara yang didirikan pada setiap ibukota propinsi atau daerah yang setingkat propinsi, baru 4 buah sampai dengan Maret 1956, yaitu : di Yogyakarta, Ambon, Semarang dan Makasar. Berdasarkan SK Menteri PP dan K nomor 29103/S ini kemudian berdiri 19 Perpustakaan Negara masing-masing di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan Pekanbaru, Padang, Palembang, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Ujung Pandang, Singaraja, Mataram, Kupang dan Ambon.

3.3. Perpustakaan Wilayah

Tiga tahun setelah terbitnya SK Mendikbud nomor 095/0/1979 tanggal 29 Mei 1979 menetapkan klasifikasi Perpustakaan Wilayah tipe A dan tipe B sehingga terbentuklah :

a. Perpustakaan Wilayah Tipe A, meliputi Perpustakaan Wilayah Semarang, Yogyakarta, Padang dan Ambon.

b. Perpustakaan Wilayah Tipe B, meliputi Perpustakaan Wilayah di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Manado, Ujung Pandang, Singaraja, Mataram dan Kupang.

Perpustakaan Wilayah Tipe B DKI Jakarta kemudian diintegrasikan dengan Perpustakaan Sejarah, Politik dan Sosial (SPS) dan Bidang Bibliografi dan Deposit pada Pusat Pembinaan Perpustakaan serta perpustakaan pada Museum Nasional dalam rangka pembentukan Perpustakaan Nasional yang didirikan berdasarkan SK Mendikbud tanggal 17 Mei 1980 nomor 0164/0/1980. Jumlah Perpustakaan Wilayah yang ada kemudian bertambah menjadi 26 buah. Penambahan tersebut terjadi dengan dibentuk dan didirikannya Perpustakaan Wilayah Tipe B baru. melalui SK Mendikbud :

a. tanggal 2 September 1980 no. 0221a/0/1980, yaitu pembentukan Perpustakaan Wilayah di Propinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalbar, Sultengg, Sulteng dan Irian Jaya;
b. tanggal 2 Desember 1982 nomor 0379/0/1982 tentang pembentukan Perpustakaan Wilayah di Propinsi Timor Timur.

3.4. Perpustakaan Daerah Jawa Barat

Perpustakaan Daerah Jawa Barat berasal dari Perpustakan Wilayah Depdikbud. Berdasarkan Keppres No. 11 tahun 1989 tetang Perpustakaan Nasional RI dibentuk, maka status Perpustakaan Wilayah Depdikbud beralih status menjadi Perpustakaan Daerah. Tugas pokok Perpustakaan Daerah Jawa Barat adalah membina layanan perpustakaan dan mengembangkan semua jenis perpustakaan di daerah serta melestarikan bahan pustaka untuk kepentingan pendidikan, penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan. Pertama kali berdirinya perpustakaan pada tanggal 29 Desember 1952 dengan nama Perpustakaan Negara. Berdasarkan Kepres RI No. 11 tahun 1989 dan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan RI No. 001/ORG/9/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perpustakaan Nasional RI yang sebelumnya sebagai perpustakaan wilayah departemen pendidikan dan kebudayaan Propinsi Jawa Barat. Tugas pokok perpustakaan daerah Jawa Barat adalah membina layanan perpustakaan dan mengembangkan semua jenis perpustakaan di daerah serta melestarikan bahan pustaka untuk kepentingan pendidikan, penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan.

3.4.1. Organisasi dan Tata Laksana

Perpustakaan Daerah Jawa Barat termasuk di dalam kategori Perpustakaan Daerah Tipe B. Dalam pelaksanaan mekanisme kerja mengacu kepada organisasi dan tata kerja yang telah digariskan dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 001/Org/9/1990 tanggal 21 September 1990.

Susunan Organisasi Perpustakaan Daerah Jawa Barat, terdiri dari :

1. Kepala Perpustakaan Daerah
2. Sub bagian Tata Usaha
3. Seksi Akuisi, Pengolahan, Bibliografi dan Deposit
4. Seksi Layanan Pustaka dan Informasi
5. Kelompok Fungsional Pustakawan

Tugas dan fungsi dari masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Perpustakaan Daerah bertugas memimpin pelak-sanaan tugas perpustakaan daerah.
b. Sub Bagian Tata Usaha bertugas memberikan pelayanan administrsi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Daerah, mempunyai fungsi :

   1) Melakukan urusan kepegawaian

2) Melakukan urusan keuangan

3) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan pe-meliharaan

c. Seksi Akuisi, Pengolahan, Bibliografi dan Deposit bertugas melakukan kegiatan akuisi dan pengolahan bahan pustaka serta kegiatan bibliografi dan deposit bahan pustaka, yang mempunyai fungsi :

1) Melakukan seleksi, verifikasi dan bibliografi pengadaan dan pencatatan buku sesuai dengan sistem perpustakaan yang berlaku

2) Melakukan katalogisasi deskriptif penentuan subyek bahan pustaka

3) Menyusun naskah pengumpulan data terbitan Indonesia yang ada di wilayahnya masing-masing

4) Melakukan pencarian dan pemantauan terbitan Indonesia yang ada di wilayahnya masing-masing.

d. Seksi Layanan Pustaka dan Informasi bertugas melakukan layanan dan jasa Perpustakaan dan Informasi yang mempunyai fungsi :

1) Melakukan layanan pinjaman bahan pustaka

2) Melakukan rujukan informasi berdasarkan bahan pustaka

3) Melakukan peminjaman bahan antar perpustakaan

e. Kelompok Tenaga Fungsional Pustakawan bertugas mem-bantu pelaksa-naan kegiatan di lingkungan Perpustakaan Daerah sesuai dengan keahliannya.

3.4.2. Sumber Daya Manusia

1. Jumlah seluruh pegawai Perpustakaan Daerah Jawa Barat sampai tanggal 31 Maret 1995 adalah 151 orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Kepala Perpustakan Daerah Jawa Barat = 1 orang

b. Sub Bagian Tata Usaha = 31 orang

c. Seksi APBD	= 31 orang
d. seksi LPI	= 47 orang
e. Kelompok Pustakawan	= 24 orang
f. Pegawai diperbantukan di daerah	= 17 orang
Jumlah	151 orang

Perpustakaan Daerah Jawa Barat menyediakan bacaan umum dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, koleksi khusus daerah Jawa Barat, koleksi UT, buku-buku referensi terdiri dari; Ensiklopedia, atlas, kamus, alamanak , bibliografi nasional dan daerah, daftar index artikel surat kabar dan majalah serta bacaan informasi dari berbagai instansi dinas pemerintahan dan lembaga swasta.

Jumlah koleksi sampai dengan Maret 1994	33.140 judul = 90.186 eks
Penambahan koleksi 94/95	3.346 judul = 13.186 eks
Jumlah	36.486 judul = 103.373 eks

3.5. Sistem Komputer yang dipakai.

Data mengenai Komputer yang dipakai di Instansi

Nama Komputer	: IBM AT or compatible
Prosesornya	: Intel 80386, 25 Mhz
Monitor	: Video Graphics Array (VGA)
Hard disks	: 83M
Floppy disks	: 1.2M, 1.44M
Dos Memory	: 640K
Extended Memory	: 1,152K
Expanded Memory	: 1,376K
Keyboard Type	: 101-Key

Operating System : DOS 5.00

Hardware :

- CPU
- Peripheral : Monitor (VGA), Printer (Epson FX-1050 dan HP Laser Jet 4L)

Software :

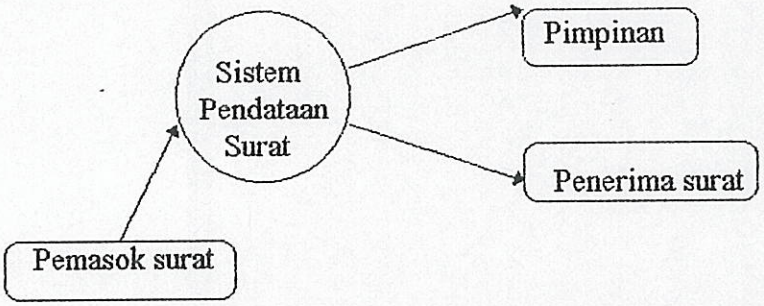
- Operating System : DOS 5.00
- Apllication Program : WS4, WS6, WS7, WP, PRINTSHOP, PRINTMASTER, DBASE III PLUS, LOTUS123 2.2, FLOWCHART
- Program Language : DBASE III Plus + Clipper

3.6. Aktifitas Sub Bagian Tata Usaha

Aktifitas Sub Bagian Tata Usaha sehari-hari adalah menjalankan program sebagai berikut :

1) Peningkatan mutu teknis/penataan perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga perpustakaan.
2) Pengadaan barang inventaris kantor.
3) Menyelesaikan langganan dan jasa listrik, te-lepon.
4) Menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan dan pengem-bangan karier pegawai.
5) Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan keuangan.
6) Menyelenggarakan pemeliharaan gedung, halaman kantor, ken-daraan dinas, inventaris kantor dan peralatan milik negara.

7) Menyelenggarakan hubungan kerja yang harmonis dengan segenap instansi yang terkait/unit kerja di daerah. Selain daripada itu aktifitas Subag TU yang berhubungan dengan sistem yang dikerjakan oleh Penyusun adalah seperti terlihat pada gambar dibawah ini :



Daftar kegiatan :

1. Pemasok surat memberikan data ke sistem
2. Sistem memberi laporan ke Kepala Perpusda
3. Sistem memberi data ke Penerima surat.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
LPKIG